IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN RI Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu pada Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau Tahun 2014-2018, Badan Ketahanan Pangan Pangan Provinsi Riau melaksanakan penerapan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah melalui penyusunan Rencana Strategis tahun 2014-2018, Penyusunan Rencana Kerja 2014 serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2014.

Untuk mewujudkan kinerja yang diharapkan, sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2014 sebagai berikut :

1. Tersedianya pangan dalam jumlah yang cukup sejumlah 2200 KKal/Kap/hari untuk energi dan 50 Gram/Kap/hari untuk protein, tingkat cadangan pangan 80 %, 200 ton.
2. Tercapainya konsumsi pangan penduduk sesuai dengan Pola Pangan Harapan 85, dengan konsumsi energi sebesar 2000 KKal/Kap/hari dan Protein sebesar 52 gr/Kap/hari.
3. Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar.
4. Berkurangnya Daerah Rawan Pangan 60 %.
5. Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Ketahanan Pangan 80 %.

Sasaran	Realisasi Pencapaian
1. Tersedianya pangan dalam jumlah yang cukup sejumlah 2200 KKal/Kap/hari untuk energi dan 50 Gram/Kap/hari untuk protein, tingkat cadangan pangan 80 %, 200 ton	• Ketersediaan Energi sejumlah 3.212 Kkal/Kap/hr, • Ketersediaan Protein sejumlah 75,57 Gr/Kap/Hr ▪ Tingkat Cadangan Pangan sebesar 57,50 % ▪ Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah sebesar 111,5 Ton.
2. Tercapainya konsumsi pangan penduduk sesuai dengan Pola Pangan Harapan, dengan konsumsi energi sebesar 2000 KKal/Kap/hari dan Protein sebesar 52 gr/Kap/hari	• Konsumsi Energi Penduduk Riau Tahun 2014 sebesar 1.973 Kkal/Kap/Hr, dan Protein sebesar 52 Gr/Kap/Hr • Skor Angka Kecukupan Gizi (AKG) 85,5% dari stabdar PPH 100% • Skor PPH Rill 79,5 dari standar PPH 100

3. Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar	• Terlaksananya Pengawasan di pasar tradisional di 12 Kabupaten/Kota. Jumlah komoditi sebanyak 11 komoditi dengan jumlah sampel 30 (tiga puluh)
4. Berkurangnya daerah rawan pangan 60 %	• Jumlah penduduk Provinsi Riau Tahun 2013 yang sangat rawan pangan berjumlah 1.270.600 jiwa atau 21,43 %. mengalami peningkatan dibanding tahun 2012 yang jumlahnya 1.017.644 jiwa atau 17,64 %. • Jumlah keluarga miskin di Provinsi Riau Tahun 2013 sebanyak 372.960 kepala keluarga, atau 29,44 %.
5. Meningkatnya kapasitas kelembagaan ketahanan pangan 80 %	Telah di bentuknya Badan/Dinas/ Instansi yang menangani ketahanan pangan di Kab/Kota : • Badan Ketahanan Pangan (Kab. Pelalawan dan Rokan Hilir) • Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan /Penyuluhan Pertanian (Kab. Rokan Hulu, Bengkalis,

Indragiri Hulu, Kota Pekanbaru)

- Badan Pelaksana Penyuluhan/Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan (Kab. Indragiri Hilir,Kampar, Siak)
- Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian,Tanaman Pangan (Kab. Kuantan Singingi Kab. Kep.Meranti, Kota Dumai)

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis terhadap pencapaian kinerja sasaran diperoleh capaian kinerja sasaran sebesar 92,26 %, dapat dikategorikan Baik. Sasaran tersebut dicapai melalui pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dianggap relevan.

Hasil evaluasi dan analisis pencapaian kinerja kegiatan yang bersumber dari APBD didapat angka capaian sebesar 63,87 % dengan kategori Kurang Baik, kategori tersebut disebabkan lambatnya pelaksanaan kegiatan dan banyaknya kegiatan yang tidak dilaksanakan atau digunakan.

Sedangkan pencapaian kinerja kegiatan yang bersumber dari APBN Dekonsentrasi didapat angka capaian sebesar 98,39 % dengan kategori Baik.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2014, Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau memperoleh dana anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi Riau sebagai berikut :

JUMLAH ANGGARAN BELANJA KEGIATAN APBD
BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2014

NO.	JENIS BELANJA	JUMLAH ANGGARAN
1.	BELANJA LANGSUNG	Rp 8.462.632.000,-
2.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Rp. 9.600.331.049,77,-
	JUMLAH	Rp. 18.062.963.049,77,-

dan berhasil direalisasikan sampai tgl, 31 bulan Desember Tahun 2014, untuk Belanja Langsung dan Belanja Tidak langsung realisasi keuangan sebesar Rp. 4.896.913.231,- atau 57,87 % dengan realisasi fisik sebesar 71,33 %, sedangkan dana Program dan Kegiatan yang bersumber dari APBN sebagai berikut :

JUMLAH ANGGARAN BELANJA KEGIATAN APBN
SATKER BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2014

NO.	JENIS ALOKASI DANA	JUMLAH ANGGARAN
1.	DEKONSENTRASI	Rp. 4.797.321.000
2.	TUGAS PEMBANTUAN	Rp. 2.918.500.000
	JUMLAH	Rp. 7.715.821.000

Untuk Alokasi dana Dekonsentrasi dengan Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat sebesar Rp. 4.797.321.000,- dengan realisasi keuangan sampai dengan tgl, 31 Desember 2014 sebesar Rp. 4.586.681.200,- (95,61 %) dengan realisasi fisik sebesar 100 %.

Sedangkan Alokasi dana Tugas Pembantuan dengan rincian yaitu : Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat sebesar

Rp. 2.918.500.000,- dengan realisasi keuangan sampai dengan tgl, 31 Desember 2014 sebesar Rp.2.838.408.200,- (97,26 %) dengan realisasi fisik sebesar 100 %.

Permasalahan yang dihadapi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan tidak terlaksana karena sampai akhir bulan Desember 2014 tidak adanya laporan dari Badan/Dinas/Instansi Kabupaten/Kota yang menangani Ketahanan Pangan mengajukan permohonan bantuan sosial berupa bahan pangan yang disampaikan dengan surat dari Kepala Desa, Camat dan Surat Keputusan Bupati/Walikota tentang adanya musibah/bencana yang melanda masyarakat, sehingga kegiatan yang berkaitan dengan investigasi dan intervensi tidak dilaksanakan.

2. Kegiatan Penguatan Cadangan Pangan pencaiaran bantuan sosial terlambat dilaksanakan sehingga beberapa kegiatan pendukung tidak dapat dilaksanakan seperti pelatihan manajemen kelompok beserta dana pendukung lainnya.

3. Droping bantuan cadangan pangan pemerintah belum dapat dilaksanakan karena permintaan dari Bupati/Walikota belum ada.

4. Dari mulai tahun anggaran sampai bulan September 2014, kegiatan tidak termasuk dalam pencairan 30 % dan pada akhir tahun pelatihan/workshop tidak dapat dilaksanakan dikarenakan waktu tidak mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan.

Untuk mengatasi masalah tersebut Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau memberikan solusi diantaranya :

1. Untuk masa yang akan datang akan ditingkatkan koordinasi dengan badan/Dinas/Instansi Kabupaten/Kota tentang penanganan daerah rawan pangan (PDRP) sehingga setiap ada kejadian rawan pangan transien dapat diatasi secara menyeluruh.

2. Perlu koordinasi yang lebih intensif dengan Sekretariat Daerah cq. Biro Keuangan untuk mengetahui apa penyebab bantuan sosial yang diusulkan oleh Instansi Teknis tidak dicairkan, karena semua persyaratan administrasi sudah dipenuhi.

3. Agar Sekretariat Daerah cq. Biro Keuangan pada tahun 2015 mempercepat pencaiaran sehingga dana pendukung lainnya dapat dilaksanakan dan perlunya sosialisasi tentang keberadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Provinsi Riau.

4. Untuk tahun akan datang perlu hati-hati dalam menentukan/menetapkan suatu kebijakan, yang akhirnya akan menghambat pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan sebaiknya dimulai pada awal tahun anggaran dan dilengkapi dengan aturan-aturan yang dapat dipedomani dalam pelaksanaan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau telah melakukan berbagai langkah strategis baik berupa koordinasi horizontal dan vertikal maupun konsolidasi dengan berbagai stakeholder yang ada, sehingga berbagai kendala dan hambatan yang muncul, dapat dieliminir dan diantisipasi sebagaimana mestinya. Meskipun demikian, dalam penyusunan

LAKIP ini, dirasakan masih banyak kekurangan. Untuk itu kami mengharapkan adanya masukan dan kritik bagi perbaikan di masa yang akan datang.

Pekanbaru, Maret 2015

KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI RIAU,

MULKAN SYARIF, SE
Pembina Utama Madya
NIP. 19630513 198311 1 001

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rakhmat dan hidayah-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014 sebagaimana diamanatkan Inpres No 7 tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah selesai disusun.

Dengan tersusunnya laporan ini, yang secara umum berpedoman pada sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) diharapkan berbagai kebijaksanaan dan kegiatan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau dapat diketahui secara luas, sehingga dapat dijadikan media dalam pengambilan keputusan dan perbaikan guna tercapainya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok & fungsi (tupoksi) masing-masing bagian.

Dan sebagai pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan Keputusan Kepala Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pengganti dari Keputusan Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99.

Oleh karenanya laporan ini juga dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengevaluasi diri khususnya Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya yang berguna bagi perencanaan dan peningkatan kinerja masing-masing bagian.

Pada kesempatan ini pula kami sampaikan ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Tim Penyusun yang telah memberikan sumbang pikiran dan tenaga sehingga laporan ini dapat terselesaikan.

Kritik dan Saran senantiasa kami harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan dan semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau dapat memberikan manfaat bagi yang berkepentingan.

Pekanbaru, Maret 2015

KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI RIAU,

MULKAN SYARIF, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19630513 198311 1 001

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF i
KATA PENGANTAR ix
DAFTAR ISI x
I. PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan LAKIP SKPD 2
1.3. Aspek Strategis yang Berpengaruh 7
1.4. Tupoksi dan Core Business 24
1.5. Sistematika Penyajian 27
II. RENCANA STRATEGIS 17
2.1. Rencana Strategis 2014-2018 17
2.2. Renetapan Kinerja Tahun 2014 32
2.3. Anggaran Tahun 2014 22
III. AKUNTABILITAS KINERJA 43
3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja 43
3.2. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2014 45
3.3. Analisis Capaian Kinerja 49
3.4. Akuntabilitas Keuangan 53
3.5. Analisis Efesiensi dan Efektivitas Kegiatan 62
3.5.1.Efesiensi 62
3.5.2.Efektivitas 66
IV. PENUTUP 69
4.1. Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja 69
4.2. Kendala dan Hambatan dalam Pencapaian Sasaran 71
4.3. Strategi Pemecahan Masalah 73

LAMPIRAN – LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Tabel Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2014
- Lampiran 2 : Tabel Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Tahun 2014

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam era globalisasi ini tuntutan terhadap paradigma good governance dalam seluruh kegiatan tidak dapat dielakkan lagi. Istilah good governance sendiri dapat diartikan terlaksananya tata ekonomi, politik dan sosial yang baik. Jika kondisi good governance dapat dicapai maka terwujudnya negara yang bersih dan responsif (clean and responsive state), semaraknya masyarakat sipil (vibrant civil society) dan kehidupan bisnis yang bertanggung jawab (good corporate governance) bukan merupakan impian lagi. Untuk dapat mencapai good governance maka salah satu hal yang harus dipenuhi adalah adanya transparansi atau keterbukaan dan akuntabilitas dalam berbagai aktivitas baik aktivitas sosial, politik dan ekonomi.

Dalam konteks pelaksanaan good governance dan menRiaukan visi Pemerintah Provinsi Riau untuk mengakselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat guna mendukung pencapaian visi Riau untuk tahun 2014-2018 yaitu ***"Terwujudnya Provinsi Riau yang Maju, Masyarakat Sejahtera dan Berdaya Saing Tinggi, Menurunnya Kemiskinan, Tersedianya Lapangan Kerja serta Pemantapan Aparatur"***.. khususnya yang menyangkut "mengembangkan struktur perekonomian daerah yang tangguh", maka pelaksanaan program dan kegiatan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau diharapkan akan berkontribusi terhadap pencapaian indikator makro ekonomi Riau.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau sebagaimana diamanatkan Inpres No 7 tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disusun berdasarkan atas tugas pokok dan fungsi Badan

Ketahanan Pangan Provinsi Riau, Renstra Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau, Renstra Provinsi Riau, kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketahanan pangan yang diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816), serta kebijakan Pemerintah Pusat di bidang ketahanan pangan dari Departemen Pertanian maupun Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian yang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

Penyusunan laporan ini secara umum berpedoman pada sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) diharapkan berbagai kebijaksanaan dan kegiatan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau dapat diketahui secara luas, sehingga dapat dijadikan media dalam pengambilan keputusan dan perbaikan guna tercapainya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok & fungsi (tupoksi) masing-masing bagian. Oleh karenanya laporan ini juga dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengevaluasi diri khususnya Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya yang berguna bagi perencanaan dan peningkatan kinerja masing-masing bagian.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan LAKIP SKPD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741), serta konsekuensi sebagai penggerak Ketahanan Pangan daerah mendorong ditatanya struktur organisasi yang melahirkan Badan Ketahanan Pangan

yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau, diserahi wewenang, tugas dan tangung jawab menunjang penyelenggaraan urusan otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi serta tugas pembantuan dibidang ketahanan pangan di daerah. Badan Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Riau melalui Sekretaris Daerah Provinsi Riau.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 17 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau yang mempunyai tugas pokok dan fungsi :

Tugas Pokok	Fungsi
Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang ketahanan pangan dan dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggraan wewenang yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada Gubernur.	1. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan; 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang ketahanan pangan; 3. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan lingkup provinsi

	dan kabupaten/kota; 4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang ketahanan pangan; 5. Pelaksanaan kesekretariatan badan; 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam kaitan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau berikut adalah peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan LAKIP Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara;

14. Instruksi Presiden RI Nomor. 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
17. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintah Provinsi (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
18. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
19. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 21 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 20 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);
20. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 21 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 56);
21. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 01 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Riau .

22. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pengganti dari Keputusan Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99
23. Peraturan Gubernur Riau Nomor 17 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau.

1.3. Aspek Strategis yang Berpengaruh

- **Kondisi Umum Ketahanan Pangan Riau**

1. Ketersediaan Energi Provinsi Riau (2009-2013)

No.	Zat Gizi	2009	2010	2011	2012	2013
1	Energi (Kkal)	2,905.00	2,965	3,002.00	3.212	3.212
	Energi Nabati	2,739.68	2,786.00	2,823.00		
	Enargi Hewani	165.56	179.00	179.00		
2	Protein (Gram)	72.33	76.61	73.31	73.26	75,57
	-Nabati	54.47	58.38	53.55		
	-Hewani	17.86	18.23	19.76		

Ketersediaan energi dan protein sudah melebihi angka anjuran : Energi penyediaan 2.200 Kkal, Protein 57 gram terjadi variasi angka PPH pangan, artinya mutu penyediaan pangan juga ada keragamannya.

2. Rata-Rata Konsumsi Energi, Protein dan Skor PPH Provinsi Riau Tahun 2010-2014

No	Tahun	Energi (Kkal/Kap/hr)	Protein (Gram/Kap/Hr)	PPH (Riau)	PPH (Nasional
1	2010	1.904	52	79,00	86,4
2	2011	2.020	52	78.50	88,1
3	2012	1.862	52	79,5	89,8
4	2013	2.079	52,7	80,1	91,5
5	2014	1.973	52	79,5	93,3

3. Perkembangan Produksi Pangan Provinsi Riau Tahun 2009-2013

No	Komoditi Pangan	Produksi (Ton)					Pert (%)
		2009	2010	2011	2012	2013	
1	Beras	332.825	363.314	338.618	323.878	276.138	-4,18
2	Jagung	49.476	41.862	33.197	31.433	28.052	-13,04
3	Kedelai	5.985	5.830	7.100	4.182	2.211	-17,26
4	Kc. Tanah	1.937	2.007	1.692	1.622	1.243	-9,90
5	Kc. Hijau	989	1.228	995	920	619	-8,77
6	Ubi Jalar	10.189	9.967	9.912	9.424	8.462	-4,47
7	Ubi Kayu	52.214	75.904	79.480	88.577	103.070	19,47
8	Sagu	171.594	222.097	249.497	249.497	126.145	-1,92
9	Buah-buahan	172.440	108.199	210.360	188.874	189.931	11,88
10	Sayuran	57.799	81.395	88.712	83.509	101.247	16,30
11	Daging	46.019	37.983	55.878	54.197	40.610	0,39
12	Telur	8.270	6.176	4.161	5.840	5.132	-7,43
13	Ikan	123.852	132.990	149.939	181.169	185.073	10,78
		1.033.588	1.086.444	1.212.012	1.223.122	1.067.933	

4. Perkembangan Kebutuhan Pangan Provinsi Riau

Tahun 2009 - 2013

No	Komoditi Pangan	Kebutuhan (Ton)					Pert (%)
		2009	2010	2011	2012	2013	
1	Beras	557.359	576.475	598.243	618.166	633.465	3,25
2	Jagung	11.917	49.887	51.647	48.026	48.269	78,91
3	Kedelai	45.233	53.213	55.090	23.717	23.529	-9,14
4	Kc. Tanah	5.020	6.097	6.312	11.858	9.653	23,56
5	Kc. Hijau	5.274	6.097	6.312	13.637	13.273	33,13
6	Ubi Jalar	10.294	16.629	17.215	8.894	8.446	2,92
7	Ubi Kayu	28.549	74.277	76.896	84.194	85.065	43,55
8	Sagu	1.065	1.663	1.625	5.929	5.430	77,57
9	Buah-buahan	130.070	82.591	80.339	185.759	190.040	23,57
10	Sayuran	263.740	144.673	149.202	285.420	293.807	13,06
11	Daging	39.401	46.007	47.630	53.363	53.090	7,95
12	Telur	41.328	48.779	50.499	44.469	44.644	2,50
13	Ikan	131.236	148.553	148.628	160.088	163.494	5,77
		1.270.487	1.254.942	1.289.639	1.543.520	1.572.205	

5. Pasokan Pangan Tahun 2009 -2012

No	Komoditi Pangan				
		2009	2010	2011	2012
1	Beras	477.804,32	483.563,04	496.362,00	503.939,87
2	Jagung	8.430,98	8.536,62	8.695,00	8.768,47
3	Kedelai	71.971,66	72.846,39	65.389,00	64.658,46
4	Kc. Tanah	13.073,15	13.235,71	13.235,71	13.910,37
5	Kc. Hijau	10.800,01	10.934,32	10.934,32	11.103,42
6	Ubi Jalar	1.706,17	6.718,89	6.718,89	2.139,84
7	Ubi Kayu	4.069,97	4.122,57	4.122,57	4.124,28
8	Sagu	-	-	-	
9	Buah-buahan	134.930,03	136.561,72	160.603,00	172.420,58
10	Sayuran	271.869,12	275.148,70	297.065,00	304.261,48
11	Daging	10.246,55	10.380,50	10.380,50	12.047,72
12	Telur	45.382,74	45.934,17	50.119,00	51.079,03
13	Ikan	58.577,00	61.273,00	61.273,00	138.624,09
		1.108.861,70	1.129.255,63	1.184.897,99	1.287.077,61

- **Isu Strategis**

Berdasarkan kondisi dan permasalahan di atas maka muncul isu strategis sebagai berikut :

1. Masih rentannya ketahanan pangan daerah, (produksi belum mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sepenuhnya seperti beras, hasil ternak, sayur dan buah), walaupun angka ketersediaan pangan dalam bentuk energi telah mencapai 3.212 Kkal/Kap/hr, protein sejumlah 75,57 Gr/Kap/Hr
2. Diversifikasi pangan belum berjalan dengan baik ditandai dengan capaian skor PPH sebesar 79,5. Hal ini disebabkan masih tingginya tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditi beras, gula, lemak/minyak, dan sebaliknya masih kurangnya konsumsi protein hewani kacang-kacangan, sayur,buah dan umbi-umbian
3. Tingginya alih fungsi lahan di masing-masing Kabupaten/Kota setiap tahunnya.
4. Kurangnya tenaga penyuluh pertanian, baik kualitas dan kuantitas.
5. Belum terpadunya kerjasama antar sektor dalam menunjang pembangunan ketahanan pangan, karena kelembagaan pangan daerah belum berjalan optimal, kurangnya koordinasi antara Kabupaten/Kota dengan Provinsi.
6. Kebijakan penganggaran untuk ketahanan pangan belum konsisten, sehingga anggaran program ketahanan pangan saat ini kecil/ tidak sesuai dibanding cakupan fungsi dan peranan ketahanan pangan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan *"political will"* terhadap program ketahanan pangan masih lemah.
7. Pendataan terhadap aspek-aspek ketahanan pangan sangat terbatas.

8. Sistem distribusi dan harga pangan belum efisien dan efektif, karena terbatasnya prasarana dan sarana perhubungan, pengolahan, penyimpanan, serta masih adanya pungutan resmi dan tidak resmi terhadap produk pangan.

- **Strategi**

Ketersediaan dan Distribusi Pangan

a. Memelihara penyediaan pangan berlandaskan kemandirian, terutama melalui peningkatan produksi berbagai jenis pangan baik untuk konsumsi dalam negeri maupun ekspor dengan memperhatikan optimalisasi pemanfaatan sumber daya.
b. Memperkuat cadangan pangan daerah yang dikelola oleh Pemerintah (CPP) dan Masyarakat (CPM).
c. Peningkatan pendapatan masyarakat untuk memperkuat akses terhadap keterjangkauan ketersediaan pangan terutama bagi penduduk miskin.
d. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perdagangan pangan terutama melalui peningkatan teknologi transportasi pangan dan menyempurnakan pola perdagangan perintis dan pelayanan perintis sesuai dengan lingkungan sistem transportasi perdagangan untuk daerah terpencil, transmigrasi, pedalaman dan perbatasan
e. Menyusun dan mengembangkan sistem pengendalian dan pencegahan timbulnya kerawanan dalam penyediaan pangan.

Konsumsi Pangan

a. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap arti dan pentingnya pola pangan harapan melalui penyuluhan gizi seimbang
b. Pengembangan makanan tradisional unggulan
c. Pengembangan produk pangan olahan yang memenuhi persyaratan mutu gizi seimbang melalui pengembangan teknologi pangan dan fortifikasi

Mutu dan Keamanan Pangan

a. Penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan dalam pengolahan pangan
b. Pemanfaatan kelembagaan dan infrastruktur pengawasan dan pembinaan mutu dan keamanan pangan

Kelembagaan Pangan

a. Peningkatan kapasitas kelembagaan di daerah sehingga tupoksi organisasi menjadi jelas.
b. Meningkatkan koordinasi antar instansi dalam mewujudkan ketahanan pangan wilayah.

1.4. Tupoksi dan Core Business

Tugas pokok dan fungsi tersebut menunjukkan bahwa area inti (*core area*) Badan Ketahanan Pangan (BKP) Provinsi Riau adalah melakukan pengembangan, implementasi (sosialisasi dan asistensi), pelayanan serta pemantauan evaluasi terhadap kewaspadaan dan ketahanan pangan di daerah. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1996 menyatakan bahwa Pemerintah bersama rakyat bertanggungjawab atas terwujudnya Ketahanan Pangan yang mantap, melalui pengembangan subsistim yang termuat dalam Sistem Ketahanan Pangan, yaitu Subsistim Ketersediaan Pangan. Subsistim Distribusi dan Subsistim Konsumsi dan Keamanan Pangan

Struktur Organisasi :

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau sampai dengan tanggal 30 Januari 2011 adalah sebagai berikut :

Bagan 1: Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau.

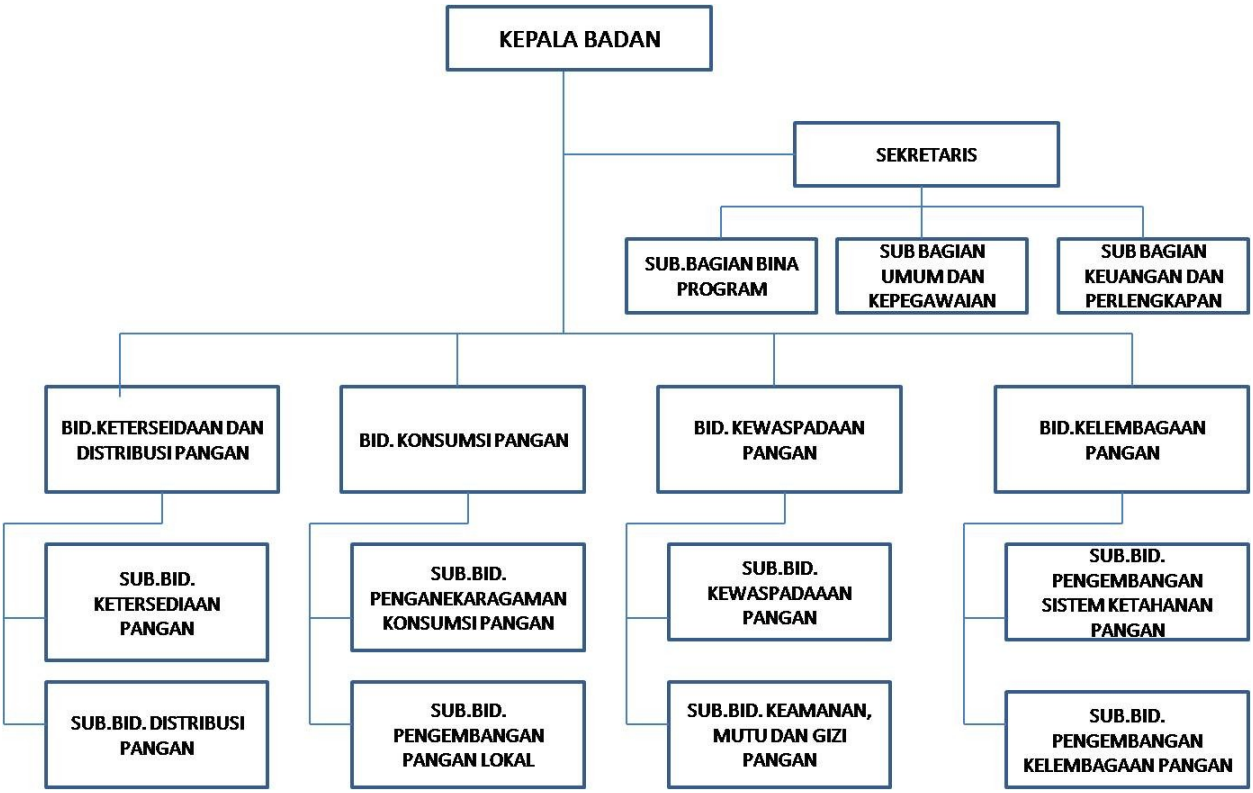

Berlandaskan pada peraturan tersebut, seluruh bagian/bidang dan subbagian/subbidang di lingkungan Badan Ketahanan Pangan (BKP) mempunyai tugas pokok, yaitu:

> **" Melaksanakan penyiapan administrasi rutin maupun teknis, penyusunan rencana di bidang ketahananan pangan, pemantauan evaluasi terhadap ketersediaan, pengadaan, cadangan pangan, kerawanan pangan dan keamanan pangan, pengembangan pangan dan analisis pola konsumsi pangan, inventarisasi, pembinaan, penyediaan dukungan dan kerjasama dengan lembaga ketahanan pangan, penyuluhan dan peningkatan kewaspadaan dan ketahanan pangan ".**

Core Business :

Mengacu pada kebijakan tersebut maka pada tahun 2014 ini arah kebijakan pembangunan Riau lebih difokuskan pada peningkatan IPM yang meliputi

aspek pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat, yang pada gilirannya diharapkan mampu menyiapkan modal dasar pembangunan.

Bagi Riau, Tahun 2014 adalah tahun pertama dalam pelaksanaan RPJMD 2014-2018 dalam rangka upaya pencapaian IPM sebesar 80. Pada tahap ini kebijakan ekonomi daerah diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkualitas melalui pengembangan kegiatan utama (*core business)* dengan mewujudkan tujuan bersama (*common goals*) dengan berdasarkan potensi local untuk mengurangi disparitas kesejahteraan antar wilayah serta memantapkan infrastruktur wilayah dalam mendukung pemerataan dan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu dari 8 (delapan) *common goals* yang telah ditetapkan antara lain point 2 (dua) yaitu Ketahanan Pangan, yang difokuskan pada komoditas beras, jagung, kedelai dan ketersediaan protein hewani.

Berkaitan dengan penjelasan diatas, maka Ketahanan Pangan mempunyai peran strategis dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah Riau Tahun 2014 dan berbagai upaya pelaksanaan program dan kegiatan ketahanan pangan 2014 adalah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebagai perwujudan pembangunan social dan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan secara keseluruhan. Oleh karena itu, upaya peningkatan kelembagaan dan infrastruktur, ketersediaan dan cadangan pangan, distribusi dan harga pangan, serta peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan akan terus dilaksanakan sebagai penggerak utama pembangunan sosial-ekonomi daerah. Dengan demikian, program-program peningkatan ketahanan pangan perlu diarahkan untuk mendorong terciptanya kondisi sosial-ekonomi yang kondusif menunju ketahanan pangan yang mantap dan berkelanjutan.

1.5. Sistematika Penyajian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kegiatan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau (LAKIP) Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau disusun dengan sistematika :

IKHTISAR EKSEKUTIF

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum Penyusunan LAKIP SKPD
1.3. Aspek Strategis yang Berpengaruh
1.4. Tupoksi dan Core Business
1.5. Sistematika Penulisan

BAB II : RENCANA STRATEGIS

2.1. Rencana Strategis 2014 – 2018
2.2. Penetapan Kinerja Tahun 2014
2.3. Anggaran Tahun 2014

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja
3.2. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2014
3.3. Analisis Capaian Kinerja
3.4. Akuntabilitas Keuangan
3.5. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Kegiatan

BAB IV : PENUTUP

4.1. Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja
4.2. Kendala dan Hambatan dalam Pencapaian Sasaran
4.3. Strategi Pemecahan Masalah

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

- Lampiran 1 **:** Formulir Rencana Kerja Tahun (RKT) Tahun 2014
- Lampiran 2 **:** Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Tahun 2014

BAB II

RENCANA STRATEGIS

2.1. Rencana Strategis 2014-2018

Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2014-2018. Selanjutnya, kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2014 dituangkan dalam dokumen Renja Tahun 2014.

Pada dasarnya, perencanaan strategis merupakan tipe perencanaan yang timbul akibat kegagalan perencanaan rasional-komprehensif yang gagal mengatasi permasalahan secara menyeluruh. Selain itu pemegang *policy* dalam perencanaan strategik tidak dimonopoli oleh para teknokrat saja, melainkan harus adanya konsensus bersama antara stakeholders sesuai sistem yang berlaku. Terkait dengan permasalahan tersebut, maka pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan renstra adalah melalui proses teknis-rasional dan proses politis.

Pernyataan visi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau sepenuhnya mengacu pada pernyataan visi Riau Pembangunan 2020, yaitu sebagai:

" Terwujudnya Ketahanan Pangan yang mantap dalam menciptakan masyarakat yang berkwalitas tahun 2020 "

Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau mendukung peran Pemerintahan Provinsi Riau itu melalui implementasi *core area* Badan Ketahanan Pangan, yaitu: ***" mewujudkan kondisi ketahanan pangan penduduk Riau sampai pada tingkat rumah tangga sebagai sasaran mikro baik kecukupan kuantum maupun kwalitas pangan dengan memperhatikan aspek 3B (Beragam, Bergizi, Berimbang), jaminan mutu***

dan kemanan pangan serta terjangkau akan daya beli masyarakat ". Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau berkeinginan menjadi katalisator pembaharuan sistim ketahanan pangan yang kuat, dinamis dan sinergis.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Badan Ketahanan Pangan menetapkan misi sebagai berikut:

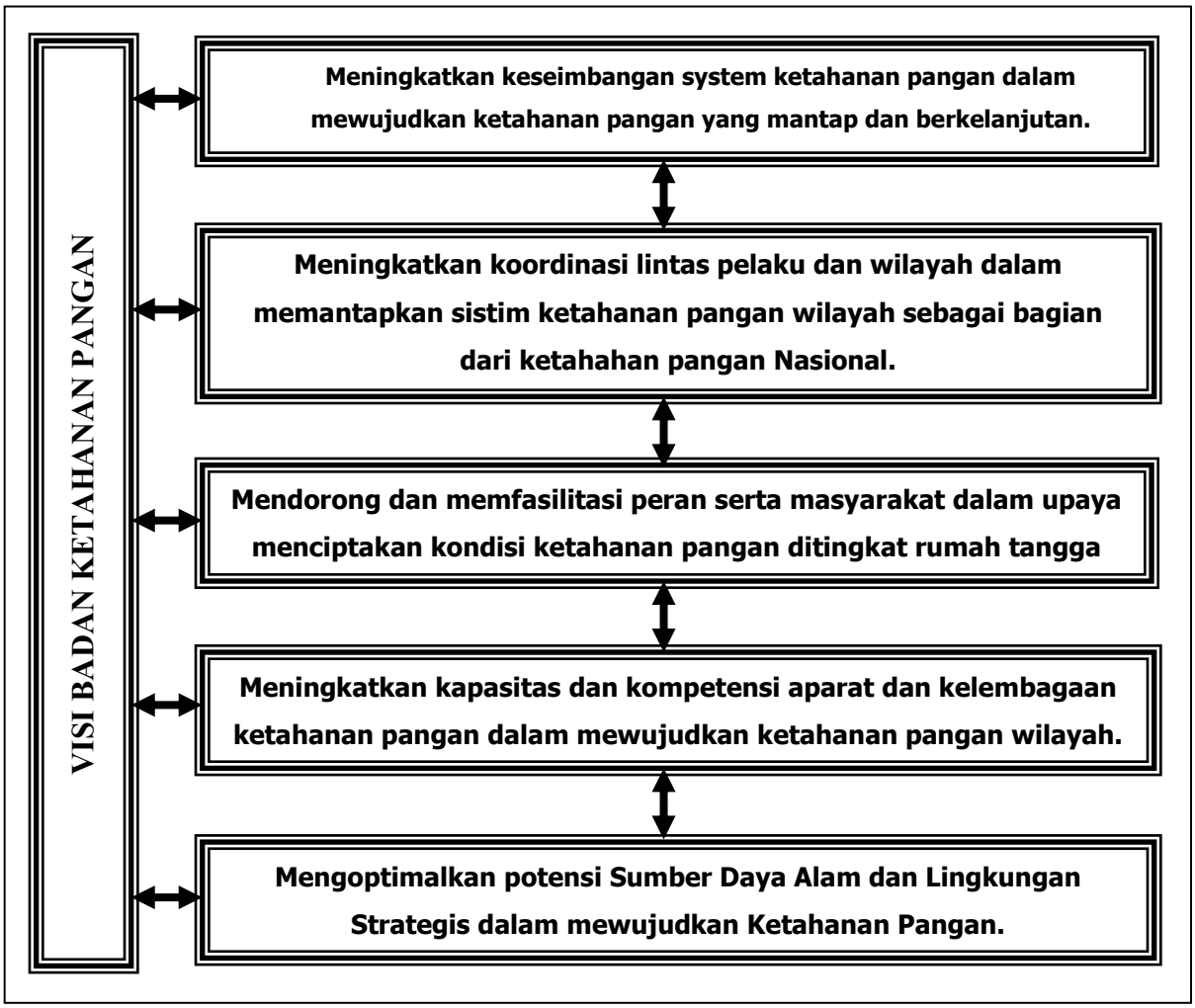

Adapun tujuan strategis dari Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan membangun subsistim ketersediaan, subsistim konsumsi dan subsistim distribusi yang sinergik dan berkelanjutan.

2. Meningkatkan kewaspadaan pangan ditingkat wilayah dengan meningkatkan kemampuan mengenali dan mengantisipasi secara dini masalah kerawanan pangan.
3. Meningkatkan diversifikasi konsumsi pangan, mengenali mutu dan keamanan pangan yang beragam, bermutu dan bergizi serta menurunnya tingkat keracunan konsumsi pangan.
4. Meningkatkan koordinasi dan peran aparatur serta masyarakat sehingga mampu mewujudkan koordinasi dalam membangun Ketahanan Pangan.

Rumusan Visi dan Pernyataan Misi Badan Ketahanan Pangan tahun 2013-2018 merupakan dasar penetapan kinerja tahunan. Seiring dengan perubahan peraturan perundangan yang terjadi pada tahun 2007, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); perwujudkan kinerja ketahanan pangan menjadi lebih banyak memperoleh tantangan-tantangan yang semakin komplek. Sehingga perlu dilakukan re-orientasi Rencana Strategis dan Implementasi Kebijakan Pembangunan Ketahanan Pangan untuk menjawab tantangan tersebut.

Program yang akan dilaksanakan dalam hubungannya dengan tujuan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
6. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.

7. Program Peningkatan Ketahanan Pangan/Pertanian/Perkebunan.
8. Program Pengembangan Data/Informasi

2.2. Penetapan Kinerja Tahun 2014.

Seperti yang telah disampaikan di bagian sebelumnya, terdapat 5 (lima) sasaran yang ingin dicapai Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau. Uraian sasaran dengan indikator dan rencana tingkat capaian/target tahun 2014 ini yaitu :

1. Tersedianya pangan dalam jumlah yang cukup sejumlah 2200 KKal/Kap/hari untuk energi dan 50 Gram/Kap/hari untuk protein, tingkat cadangan pangan 80 %, 200 ton.
2. Tercapainya konsumsi pangan penduduk sesuai dengan Pola Pangan Harapan, dengan konsumsi energi sebesar 2000 KKal/Kap/hari dan Protein sebesar 52 gr/Kap/hari.
3. Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Berkurangnya daerah rawan pangan di 12 Kabupaten/Kota.
4. Meningkatnya kapasitas kelembagaan ketahanan pangan masyarakat di 12 Kabupaten/Kota.
5. Meningkatnya kapasitas kelembagaan ketahanan pangan 80 %.

Dalam rangka pencapaian sasaran dengan rencana tingkat pencapaian yang telah ditentukan, pada tahun 2014 Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau melaksanakan program dan kegiatan yang bersumber dari APBD yaitu sebagai berikut :

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI :

Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran BKP Prov. Riau

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :

Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur.

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR :

Kegiatan dalam upaya peningkatan disiplin Aparatur.

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur.

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN :

Kegiatan Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan Internal Badan Ketahanan Pangan

PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI

1. Pengembangan dan Pemberdayaan Cadangan Pangan Masyarakat.
2. Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Berimbang dan Aman (B2SA)
3. Penanganan Daerah Rawan Pangan
4. Pemberdayaan Gapoktan dalam penyedia pangan masyarakat se Provinsi Riau.

PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN/ PERKEBUNAN:

1. Pengembangan Desa Mandiri Pangan
2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ketahanan Pangan
3. Sertifikasi Pangan Segar (buah dan sayur)
4. Penyusunan statistik Pangan
5. Sinkronisasi Peningkatan Ketahanan Pangan
6. Lomba Cipta Menu B2SA Tingkat Provinsi dan Nasional
7. Peningkatan Akselerasi Ketahanan Pangan di Provinsi Riau
8. Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan
9. Rapat Koordinasi Teknis Ketahanan Pangan se-Provinsi Riau
10. Pengelolaan Pemanfaatan Pekarangan/Peran Perempuan dalam Ketahanan Pangan
11. Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)

12. Pemantauan dan Analisis Ketersediaan Pangan Wilayah
13. Pengembangan Pangan Lokal .
14. Pemantauan Akses, Pasokan dan Harga Pangan
15. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran
16. Pameran Agribisnis dan Hasil Produksi Pangan Lokal
17. Analisis Situasi Konsumsi Pangan Penduduk
18. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau.
19. Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan

PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI

1. Dukungan Pelaksanaan Pameran Tahunan Provinsi Provinsi Riau.
2. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Ketahanan Pangan

2.3. Anggaran Tahun 2014

Sumber Dana APBD :

Tahun Anggaran 2014 Badan Ketahanan Pangan Melaksanakan 8 (delapan) program dan 55 kegiatan, 5 (lima) program dengan 23 kegiatan merupakan program yang ada di setiap SKPD sedangkan 3 (tiga) program dengan 32 kegiatan yang langsung dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan sebagai kegiatan pembangunan yaitu program peningkatan kesejahteraan petani dengan 4 (empat) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 1.430.000.000,- Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan dengan kegiatan sebanyak 21 (dua puluh satu) kegiatan dengan anggaran sejumlah Rp. 6.400.000.000,- serta Program Pengembangan Data/Informasi dengan 7 (tujuh) kegiatan Rp. 998.550.000,-.-

Tabel Program dan kegiatan Tahun Anggaran 2014 sebelum dan setelah perubahan sebagai berikut :

No.	Nama Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan

I	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**1.106.000.000,00**	**1.339.890.000,00**
1	Penyediaan jasa surat menyurat	10.000.000,00	10.000.000,00
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	260.000.000,00	260.000.000,00
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	106.000.000,00	176.840.000,00
4	Penyediaan alat tulis kantor	75.000.000,00	75.000.000,00
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	60.000.000,00	60.000.000,00
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	75.000.000,00	75.000.000,00
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.000.000,00	100.000.000,00
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	30.000.000,00	30.000.000,00
9	Penyediaan makanan dan minuman	50.000.000,00	50.000.000,00
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	275.000.000,00	438.050.000,00
11	Penyediaan jasa administrasi kantor	65.000.000,00	65.000.000,00
II	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**685.000.000,00**	**185.000.000,00**
12	Pembangunan Gedung Kantor	500.000.000,00	-
13	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	35.000.000,00	35.000.000,00
14	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	40.000.000,00	40.000.000,00
15	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	50.000.000,00	50.000.000,00
16	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	60.000.000,00	60.000.000,00
III	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**97.000.000,00**	**-**
17	Pegadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	97.000.000,00	-
IV	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**61.000.000,00**	**26.000.000,00**
18	Pendidikan dan pelatihan formal	35.000.000,00	-
19	Pembinaan mental dan fisik aparatur	26.000.000,00	26.000.000,00
V	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**218.000.000,00**	**187.050.000,00**
20	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	43.000.000,00	43.000.000,00

21	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	10.000.000,00	10.000.000,00
22	Penyusunan Rencana Kinerja (Renja) SKPD	150.000.000,00	126.450.000,00
23	Penyusunan LAKIP	15.000.000,00	7.600.000,00
VI	**Program Peningkatan Kesejahteraan Petani**	**1.430.000.000,00**	**1.411.000.000,00**
24	Pengembangan dan Pemberdayaan Cadangan Pangan Masyarakat	400.000.000,00	400.000.000,00
25	Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Berimbang dan Aman (B2SA)	500.000.000,00	484.550.000,00
26	Penanganan Daerah Rawan Pangan	200.000.000,00	177.050.000,00
27	Pemberdayaan Gapoktan dalam penyedia pangan masyrakat se Provinsi Riau	350.000.000,00	350.000.000,00
VII	**Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan**	**6.400.000.000,00**	**5.037.342.000,00**
28	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	600.000.000,00	501.242.000,00
29	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Ketahanan Pangan	100.000.000,00	100.000.000,00
30	Sertifikasi Pangan Segar (Buah dan Sayur)	250.000.000,00	250.000.000,00
31	Penyusunan Statistik Pangan	100.000.000,00	100.000.000,00
32	Sinkronisasi Peningkatan ketahanan Pangan	250.000.000,00	250.000.000,00
33	Lomba Cipta Menu B2SA Tingkat Provinsi dan Nasional	350.000.000,00	333.850.000,00
34	Peningkatan Akselerasi Ketahanan Pangan di Provinsi Riau	200.000.000,00	200.000.000,00
35	Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	400.000.000,00	385.350.000,00
46	Rapat Kordinasi Teknis Ketahanan Pangan se Provinsi Riau	300.000.000,00	283.850.000,00
37	Pengelolaan Pemanfaatan Pekarangan/Peran Perempuan dalam Ketahanan Pangan	260.000.000,00	243.850.000,00
38	Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	400.000.000,00	366.400.000,00
39	Pemantauan dan Analisis Ketersediaan Pangan Pangan Wilayah	200.000.000,00	200.000.000,00
40	Pengembangan Pangan Lokal	300.000.000,00	271.600.000,00
41	Pemantauan dan Analisis Ketersediaan Pangan Wilayah	400.000.000,00	400.000.000,00
42	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran	50.000.000,00	50.000.000,00
43	Pameran Agribisnis dan Hasil Produksi Pangan Lokal	400.000.000,00	400.000.000,00

44	Analisis Situasi Konsumsi Pangan Penduduk	300.000.000,00	300.600.000,00
45	Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau	40.000.000,00	40.000.000,00
46	Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	400.000.000,00	361.200.000,00
47	Kajian Ketahanan Pangan Provinsi Riau	800.000.000,00	-
48	Kajian Model dan Strategi Peningkatan Ketahanan Pangan Provinsi Riau	300.000.000,00	-
VIII	**Program Pengembangan Data/Informasi**	**998.550.000,00**	**275.750.000,00**
49	Dukungan Pelaksanaan Pameran Tahunan Provinsi Riau	150.000.000,00	175.750.000,00
50	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Ketahanan Pangan	100.000.000,00	100.000.000,00
51	Promosi Ketahanan Pangan Provinsi Riau Pda Media TV Online	150.000.000,00	-
52	Visualisasi Peningkatan Ketahanan Pangan Provinsi Riau pada media TV Online	150.000.000,00	-
53	Visualisasi Peningkatan Kesejahteraan Petani pada media TV Online	150.000.000,00	-
54	Visualisasi Peningkatan Ketahanan Pangan Provinsi Riau pada media TVOnline	150.000.000,00	-
55	Informasi Peningkatan Ketahanan Pangan Provinsi Riau melalui Media Cetak	150.000.000,00	-
	Jumlah	**11.015.550.000,00**	**8.462.632.000,00**

Sumber Dana APBN :

Kegiatan Ketahanan Pangan tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan, merupakan kegiatan lanjutan dari RPJM 2010-2014. Kegiatan tersebut direncanakan dengan mempertimbangkan : (1) keberlanjutan program dan kegiatan; (2) fokus dan penajaman pada implementasi tugas pokok dan fungsi kelembagaan; (3) dilakukan sinergi antar program/kegiatan; dan (4) sinkronisasi antara program pusat dan daerah. Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun pertama RPJM 2010-2014 tersebut, masih menggunakan format program dan kegiatan pada tahun yang lalu, tetapi arah dan substansi kegiatannya sudah menerapkan kegiatan-kegiatan untuk mencapai keluaran yang dirancang pada sasaran jangka menengah 2010-2014.

Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau pada tahun 2014 mendapatkan sumber dana APBN Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dilaksanakan melalui Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan jumlah dana Rp.9.428.500.000,-, kemudian pada anggaran perubahan menjadi Rp. 7.715.821.000,-. Untuk dana Dekonsentrasi Tahun 2014 dimana terdapat alokasi dana untuk Provinsi dan 8 Kabupaten/Kota diantaranya :

1.	Provinsi	Rp.	1.297.375.000
2.	Siak	Rp.	480.250.000
3.	Pekanbaru	Rp.	187.479.000
4.	Dumai	Rp.	610.600.000
5.	Kuantan Singingi	Rp.	417.317.000
6.	Rokan Hilir	Rp.	957.000.000
7.	Indragiri Hulu	Rp.	128.300.000

8. Kampar	Rp.	121.300.000
9. Kep.Meranti	Rp.	596.800.000

Sedangkan untuk dana Tugas Pembantuan tahun 2014 dialokasikan untuk 4 (empat) Kabupaten dengan jumlah Rp. 2.918.500.000,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Pelalawan Rp. 534.000.000,-
2. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Indragiri Hilir Rp. 736.000.000,-
3. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Bengkalis Rp. 1.029.500.000,-
4. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Rokan Hulu Rp. 619.000.000.-

Kebijakan

1. Peningkatan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan :
   - Ketersediaan dan cadangan pangan berbasis sumberdaya domestik.
   - Pemantapan kemandirian pangan.
   - Pemberdayaan ketahanan pangan.
2. Peningkatan Distribusi Pangan :
   - Pengembangan distribusi pangan.
   - Koordinasi dan sinkronisasi distribusi.
   - Pemberdayaan distribusi pangan.
3. Peningkatan Konsumsi dan Keamanan Pangan :
   - Konsumsi dan keamanan pangan berbasis pangan lokal.
   - Penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya, kelembagaan, berdaya dan kearifan lokal.

- Peningkatan keamanan pangan.

4. Peningkatan Manajemen Ketahanan Pangan :
   - Pelayanan prima.
   - Koordinasi pusat dan daerah, lintas sektor.
   - Partisipasi dan peran masyarakat.
   - Optimalisasi Dewan Ketahanan Pangan

Kegiatan APBN 2014

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan tahun 2014 dilaksanakan melalui Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas harga Pangan
   a. Jumlah Gapoktan yang diberdayakan : 3 Gapoktan
   b. Jumlah Lumbung Pangan yang diberdayakan : 5 unit
   c. Laporan Kondisi Harga Pangan Pokok : 1 Laporan

2. Pengembangan Ketersediaan Dan Penanganan Rawan Pangan
   a. Jumlah Desa Mandiri yang diberdayakan : 13 Desa
   b. Lokasi Penanganan Rawan Pangan, SKPG : 9 Lokasi
   c. Laporan Kajian Ketersediaan Pangan, Rawan Pangan dan Akses Pangan : 1 Laporan
   d. Laporan Kegiatan dan Pembinaan (Output Generik) : 1 Laporan

3. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar
   a. Pendampingan P2KP (Percepatan Penganekragaman Konsumsi Pangan) : 70 Desa
   b. Pemantauan, Monitoring, Evaluasi dan Perumusan Kebijakan P2KP : 1 Laporan
   c. Situasi Konsumsi Pangan Penduduk : 1 Laporan

d. Hasil Koordinasi Keamanan Pangan Segar : 1 Laporan

4. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan
   a. Dokumen Perencanaan, penganggaran dan laporan keuangan : 1 Dokumen
   b. Hasil Pemantauan dan Evaluasi Program : 1 Laporan
   c. Dukungan Manajemen dan Administrasi : 12 bulan layanan

Tahun anggaran 2014 Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau dialokasikan APBN Murni dekonsentrasi sebesar Rp. 6.510.000.000 dan APBN Perubahan Rp. 4.797.321.000,- sedangkan realisasi dana dekonsentrasi sebesar Rp. 4.586.681.200,- (95,61 %)

Tugas Pembantuan sebesar Rp.2.918.500.000,- sedangkan terealisasi sebesar Rp.2.838.408.200,- (97,26) yang dilaksanakan melalui Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat,

Pada tingkat Kabupaten juga dialokasikan dana Tugas Pembantuan di 4 (empat) Kabupaten, yaitu Kabupaten Pelalawan Rp. 534.000.000,-, Kabupaten Indragiri Hilir Rp. 736.000.000,- Kabupaten Bengkalis Rp. 1.029.500.000,- dan Kabupaten Rokan Hulu Rp. 619.000.000,- Realisasi anggaran APBN 2014 per Satuan Kerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel : Anggaran dan Realisasi Belanja dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

NO	SATKER	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN REVISI	REALISASI Rp	%
I	**Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau**				
1	Dekonsentrasi	6.510.000.000	4.797.321.000	4.586.681.200	95,61
2	Tugas Pembantuan	2.918.500.000	2.918.500.000	2.838.408.200	97,26
	Jumlah I	9.428.500.000	7.715.821.000	7.425.089.400	96,23
II	**Kabupaten Tugas Pembantuan**				
1	BADAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PELALAWAN	534.000.000	534.000.000	515.505.200	96,54
2	BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	736.000.000	736.000.000	735.491.000	99,93
3	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULHAN KABUPATEN BENGKALIS	1.029.500.000	1.029.500.000	975.504.400	94,76
4	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULHAN KABUPATEN ROKAN HULU	619.000.000	619.000.000	611.907.600	98,85
	Jumlah II	2.918.500.000	2.918.500.000	2.838.408.200	97,26

Sasaran Kegiatan APBN 2014

1. Dipertahankannya ketersediaan pangan sebesar 2.200 Kkal/kap/hari.
2. Terpenuhinya rata-rata konsumsi energi 2.000 Kkal/Kap/Hari dan protein 52 Gram/Kap/Hari .
3. Pengembangan Kawasan Desa Mandiri pangan di 5 Kab/Kota (Bengkalis, Inhil, Dumai dan Meranti)
4. Pengembangan Lumbung Pangan DAK tahap Pengembangan di 5 Lumbung.
5. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi pangan di 70 Desa, melalui Pemanfaatan pekarangan/kebun bibit dan KRPL.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran tersebut merupakan hasil suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator masukan, keluaran dan hasil. Penilaian ini merupakan proses pengolahan masukan menjadi keluaran dan hasil terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Kerangka pengukuran kinerja merupakan beberapa tahapan yang berawal dari pengumpulan data kinerja hingga pengukuran kinerja. Indikator yang digunakan sebagai instrumen acuan telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja yang terdapat dalam Rencana Kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dalam format Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan format Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Rumusan yang digunakan untuk mengetahui presentase tingkat capaian digunakan 2 (dua) rumusan yaitu :

- Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik, maka digunakan rumusan :

$$\text{Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian rencana tingkat pencapaian, maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi-(Realisasi-Rencana)}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Penilaian dilakukan dengan membandingkan hasil penghitungan dengan skala sebagai berikut :

- Lebih dari 100 % : Sangat Baik
- 100% > nilai > 80 % : Baik
- 80 % > nilai > 50 % : Cukup
- 50% > Nilai : Kurang

3.2. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2014.

Sasaran Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2014 dapat dilihat capaian kinerjanya pada tabel berikut :

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi	Prosentase Tingkat Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tersedinya Pangan dalam jumlah yang cukup	Angka Ketersediaan Energi dan Protein	Energi (Kkal/Kap/Hr)	2200	3.363	152,86 %
			Protein (Gr/Kap/Hr)	50	71,53	143,06 %
		Persentase dan tingkat cadangan pangan	%	60	33,45	55,75 %
		Ketersediaan	Ton	200	111,5	55,75 %
		Informasi Distribusi Pangan, Harga Pangan dan Pasokan Pangan	%	100	100	100 %
2.	Tercapainya Konsumsi Pangan Penduduk sesuai Pola Pangan Harapan	Persentase Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan		85	79,5	93,53
		Angka Pencapaian Konsumsi Pangan Penduduk (energi dan protein)	Energi (Kkal/Kap/Hr)	2000	1.973	98,65 %
			dan Protein (Gr/Kap/Hr)	52	52	100 %
3.	Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar	Persentase Pembinaan dan Pengawasan	%	80	80	100 %
		Keamanan Pangan Persentase Angka Pangan Tercemar	%	< 50	< 50	100 %
4.	Berkurangnya Daerah Rawan Pangan	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	%	60	0	0
5.	Meningkatnya Kapasiatas Kelembagaan Ketahanan Pangan	Persentase Jumlah Kelembagaan yang menangani Ketahanan Pangan	%	80	80	100
		Persentase Koordinasi	%	90	90	100

		Progam Bidang Ketahanan Pangan				
JUMLAH						92,26

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja sasaran Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau TA 2014 adalah 92,26 %.

Untuk pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja 25 (dua puluh lima) kegiatan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau pada tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut :

NO.	KEGIATAN	Persentase Capaian Input	Persentase Capaian Output	Persentase Capaian Outcome	Rata-rata
1	Pengembangan dan Pemberdayaan Cadangan Pangan Masyarakat	51,40	29,41	29,41	36,74
2	Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Berimbang dan Aman (B2SA)	79,47	-	100,00	59,82
3	Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan	-	-	100,00	33,33
4	Pemberdayaan Gapoktan dalam Penyedia Pangan Masyarakat se Provins Riau	45,34	32,50	50,00	42,61
5	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	19,90	100,00	1 00,00	39,97
6	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ketahanan Pangan	49,86	-	100,00	49,95
7	Sertifikasi Pangan Segar (Buah dan Sayur)	20,53	70,00	41,67	44,07
8	Penyusunan Statistik Pangan	65,80	100,00	100,00	88,60
9	Sinkronisasi Peningkatan Ketahanan Pangan	62,31	100,00	100,00	87,44
10	Lomba Cipta MenuB2SA Tingkat Provinsi dan Nasional	84,30	83,33	83,33	83,65

11	Peningkatan Akselerasi Ketahanan Pangan di Provinsi Riau	63,58	80,00	41,67	61,75
12	Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	48,24	100,00	100,00	82,75
13	Rapat Koordinasi Teknis Ketahanan Pangan se Provinsi Riau	-	-	-	-
14	Pengelolaan Pemanfaatan Pekarangan/Peran Perempuan dalam Ketahanan Pangan	67,89	96,00	80,00	81,30
15	Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	38,33	94,74	91,67	74,91
16	Pemantauan dan Analisis Ketersediaan Pangan Wilayah	90,95	100,00	140,13	110,36
17	PengembanganPangan Lokal	-	-	-	-
18	Pemantauan Akses, Pasokan dan Harga Pangan	80,86	100,00	100,00	93,62
19	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran	67,45	20,00	20,00	35,82
20	Pameran Agribisnis dan Hasil Produksi Pangan Lokal	89,39	100,00	100,00	96,46
21	Analisis Situasi Konsumsi Pangan Penduduk	59,92	100,00	94,87	84,93
22	Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau	19,60	100,00	100,00	73,20
23	Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	51,34	100,00	100,00	83,78
24	Dukungan Pelaksanaan Pameran Tahunan Provinsi Riau	91,64	100,00	100,00	97,21
25	Pengembangan Siistem Informasi Manajemen Ketahanan Pangan	63,50	100,00	-	54,50
	JUMLAH	52,46	68,24	74,91	63,87

Keterangan : Makin besar angka persentase hasil penilaian, makin baik kinerja pelaksanaan kegiatan tersebut.

Tabel di atas menunjukkan pencapaian kinerja kegiatan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau TA 2014 adalah 63,87 %. Dengan catatan bahwa untuk kegiatan-kegiatan dalam program pilihan penilaian "Persen Capaian Outcome" adalah angka capaian outcome harapan, sedangkan kegiatan-kegiatan dalam program wajib penilaiannya adalah output kegiatan langsung dirasakan manfaatnya.

Pencapaian kinerja untuk kegiatan yang bersumber dari APBN adalah sebagai berikut :

Dekonsentrasi

NO.	KEGIATAN	Persentase Capaian Input	Persentase Capaian Output	Persentase Capaian Outcome	Rata-rata
1	Pengembangan Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	98,71	100,00	100,00	99,57
2	Pengembangan ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan	95,27	100,00	100,00	98,42
3	Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar	96,95	99,00	100,00	98,65
4	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan	90,72	100,00	100,00	96,91
	Jumlah	95,41	99,75	100,00	98,39

Tabel di atas menunjukkan rata-rata capaian kinerja kegiatan Badan Ketahanan Pangan yang bersumber dari APBN Tahun 2014 dari dana Dekonsentrasi 98,39 %. Dengan catatan bahwa untuk kegiatan-kegiatan

dalam program pilihan penilaian "Persen Capaian Outcome" adalah angka capaian outcome harapan.

3.3. Analisis Capaian Kinerja.

Seperti telah disebutkan sebelumnya, bahwa terdapat tujuan dan sasaran yang ditargetkan oleh Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau Tahun 2014. Berikut ini adalah rincian sasaran, indikator, realisasi dan kegiatan pendukung yang dilaksanakan tahun 2014 :

1. Tersedianya bahan pangan dan cadangan pangan di Provinsi, Kabupaten/Kota dan Rumah Tangga. Indikator sasaran ini adalah Jumlah Cadangan beras Pemerintah Provinsi sebanyak 111,500 ton. Realisasi sampai dengan tahun 2014 adalah 111,500 ton sehingga angka capaiannya adalah 100 %. Kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah Kegiatan Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau.

2. Tersedianya pangan dalam jumlah yang cukup baik untuk energi maupun untuk protein. Indikator sasaran ini adalah tercapainya angka kecukupan energi sebesar Energi 2.400 (KKal/Kap/Hr) dan protein 63 (Gram/Kap/Hr). Realisasi sampai dengan tahun 2014 adalah 3.363 (KKal/Kap/Hr) dan protein 71,53 (Gram/Kap/Hr) sehingga angka capaiannya adalah 140,13 % dan 113,54 %. Kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah Kegiatan Pemantauan dan Analisis Ketersediaan Pangan Wilayah.

3. Perbaikan menu makanan rakyat yang bermutu, beragam, bergizi seimbang, aman, halal dan meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan sesuai potensi sumberdaya lokal. Indikator sasaran ini adalah Tercapainya Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

sebesar 85 Realisasi sampai dengan tahun 2014 adalah 79,5 angka capaianya 93,53 %. Untuk konsumsi Energi Penduduk 1.973 dan konsumsi protein Penduduk 52 angka capaianya 98,65 % dan 100 %. Kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah Kegiatan Analisis Situasi Konsumsi Pangan Penduduk.

4. Berkurangnya Daerah Rawan Pangan.
   Indikator sasaran ini adalah Jumlah daerah rawan pangan baik yang disebabkan oleh bencana alam dapat ditanggulangi di 12 kab/kota. Realisasi sampai dengan tahun 2014 angka capaianya adalah 0 %. Kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah Kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan.

5. Meningkatnya kapasitas kelembagaan ketahanan pangan masyarakat.
   Indikator sasaran ini adalah Jumlah Kapasitas Kelembagaan Ketahanan Pangan Masyarakat di 12 kab/kota. Realisasi peningkatan dan pembinaan kelembagaan sampai dengan tahun 2014 adalah 12 kab/kota sehingga angka capaiannya adalah 100 %, Kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan.

6. Pemberdayaan ekonomi dan perbaikan gizi bagi anak SD/SLTP dan SLTA di Pekanbaru.
   Indikator sasaran ini adalah Jumlah anak SD/SLTP dan SLTA di Pekanbaru yang mengikuti kegiatan Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Berimbang dan Aman (B2SA). Realisasi sampai dengan tahun 2014 adalah 1.500 orang sehingga angka capaiannya adalah 100 %.

Kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah Kegiatan Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Berimbang dan Aman (B2SA).

7. Mengembangkan dan perbaikan sistem distribusi pangan yang efektif dan efisien dalam rangka stabilitas pangan yang lebih merata.
   Indikator sasaran ini adalah terbinanya 80 Gapoktan, Realisasi sampai dengan tahun 2014 adalah terbinanya lembaga distribusi pangan 26 Gapoktan sehingga angka capaiannya adalah 32,50 %.
   Kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah Kegiatan Pemberdayaan Gapoktan dalam Penyedia Pangan Masyarakat se Provinsi Riau.

8. Pengembangan Pangan Lokal kegiatannya tidak terealisasi pada tahun 2014, jumlah capaiannya 0 %.

9. Terbinanya pemantapan ketahanan pangan keluarga :
   Indikator sasaran ini adalah Jumlah kelompok tani desa sebanyak 12 desa. Realisasi sampai dengan tahun 2014 adalah 12 kelompok tani desa sehingga angka capaiannya adalah 100 %.
   Kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan.

Dari tabel pencapaian kinerja kegiatan yang disampaikan pada tabel sebelumnya, didapat angka pencapaian kinerja kegiatan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau Tahun 2014 sebesar **63,87 %**. Pada tabel tersebut dapat dilihat tingkat rata-rata penilaian terkecil terdapat pada kegiatan Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Berimbang dan Aman (B2SA) sebesar 75,70 % dan tingkat rata-rata penilaian terbesar terdapat pada Kegiatan Fasilitasi

Pengembangan Cadangan Pangan Daerah yang melebihi dari target sebesar 106 %, kegiatan lainnya dengan tingkat rata-rata masing-masing persentase sebesar 100,00 %.

Dengan angka capaian kinerja kegiatan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau yang bersumber dari APBD yaitu sebesar 63,87 % dan yang bersumber dari APBN dari dana Dekonsentrasi 98,36 sesuai dengan format penilaian kinerja termasuk dalam kategori pelaksanaan kegiatan dengan kinerja yang baik.

3.4. Akuntabilitas Keuangan

Tahun anggaran 2014 Badan ketahanan pangan mendapat alokasi anggaran APBD Murni setelah perubahan sejumlah **Rp. 18.062.963.049,77**,- yang terdiri dari **Belanja Tidak Langsung Rp. 8.462.632.000**,- dan **Belanja Langsung Rp. 9.600.331.049,77**,- dengan jumlah program sebanyak 8 (delapan) program sebagai berikut :

N0	Program	Anggaran Perubahan (Rp)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.339.890.000,00
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	185.000.000,00
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	26.000.000,00
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	187.050.000,00
6.	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Pertanian dan Perkebunan	1.414.600.000,00

7.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan/Pertanian/Perkebunan	5.037.342.000,00
8.	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	275.750.000,00
	JUMLAH	8.462.632.000

Tahun anggaran 2014 Badan Ketahanan Pangan Melaksanakan 8 (delapan) program dan 55 kegiatan, 5 (lima) program dengan 23 kegiatan merupakan program yang ada di setiap SKPD sedangkan 3 (tiga) program dengan 32 kegiatan yang langsung dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan sebagai kegiatan pembangunan yaitu program peningkatan kesejahteraan petani dengan 4 (empat) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 1.411.600.000,- Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan dengan kegiatan sebanyak 21 (dua puluh satu) kegiatan dengan anggaran sejumlah Rp. 5.037.342.000,- serta Program Pengembangan Data/Informasi dengan 2 (dua) kegiatan Rp. 275.750.000.-

Tabel Program dan kegiatan tahun anggaran 2014 sebelum dan setelah perubahan sebagai berikut :

No.	Nama Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
I	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**1.106.000.000,00**	**1.339.890.000,00**
1	Penyediaan jasa surat menyurat	10.000.000,00	10.000.000,00
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	260.000.000,00	260.000.000,00
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	106.000.000,00	176.840.000,00
4	Penyediaan alat tulis kantor	75.000.000,00	75.000.000,00
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	60.000.000,00	60.000.000,00

6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	75.000.000,00	75.000.000,00
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.000.000,00	100.000.000,00
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	30.000.000,00	30.000.000,00
9	Penyediaan makanan dan minuman	50.000.000,00	50.000.000,00
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	275.000.000,00	438.050.000,00
11	Penyediaan jasa administrasi kantor	65.000.000,00	65.000.000,00
II	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**685.000.000,00**	**185.000.000,00**
12	Pembangunan Gedung Kantor	500.000.000,00	-
13	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	35.000.000,00	35.000.000,00
14	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	40.000.000,00	40.000.000,00
15	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	50.000.000,00	50.000.000,00
16	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	60.000.000,00	60.000.000,00
III	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**97.000.000,00**	**-**
17	Pegadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	97.000.000,00	-
IV	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**61.000.000,00**	**26.000.000,00**
18	Pendidikan dan pelatihan formal	35.000.000,00	-
19	Pembinaan mental dan fisik aparatur	26.000.000,00	26.000.000,00
V	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**218.000.000,00**	**187.050.000,00**
20	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	43.000.000,00	43.000.000,00
21	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	10.000.000,00	10.000.000,00
22	Penyusunan Rencana Kinerja (Renja) SKPD	150.000.000,00	126.450.000,00
23	Penyusunan LAKIP	15.000.000,00	7.600.000,00
VI	**Program Peningkatan Kesejahteraan Petani**	**1.430.000.000,00**	**1.411.000.000,00**
24	Pengembangan dan Pemberdayaan Cadangan Pangan Masyarakat	400.000.000,00	400.000.000,00

25	Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Berimbang dan Aman (B2SA)	500.000.000,00	484.550.000,00
26	Penanganan Daerah Rawan Pangan	200.000.000,00	177.050.000,00
27	Pemberdayaan Gapoktan dalam penyedia pangan masyrakat se Provinsi Riau	350.000.000,00	350.000.000,00
VII	**Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan**	**6.400.000.000,00**	**5.037.342.000,00**
28	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	600.000.000,00	501.242.000,00
29	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Ketahanan Pangan	100.000.000,00	100.000.000,00
30	Sertifikasi Pangan Segar (Buah dan Sayur)	250.000.000,00	250.000.000,00
31	Penyusunan Statistik Pangan	100.000.000,00	100.000.000,00
32	Sinkronisasi Peningkatan ketahanan Pangan	250.000.000,00	250.000.000,00
33	Lomba Cipta Menu B2SA Tingkat Provinsi dan Nasional	350.000.000,00	333.850.000,00
34	Peningkatan Akselerasi Ketahanan Pangan di Provinsi Riau	200.000.000,00	200.000.000,00
35	Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	400.000.000,00	385.350.000,00
46	Rapat Kordinasi Teknis Ketahanan Pangan se Provinsi Riau	300.000.000,00	283.850.000,00
37	Pengelolaan Pemanfaatan Pekarangan/Peran Perempuan dalam Ketahanan Pangan	260.000.000,00	243.850.000,00
38	Pengembagnan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	400.000.000,00	366.400.000,00
39	Pemantauan dan Analisis Ketersediaan Pangan Pangan Wilayah	200.000.000,00	200.000.000,00
40	Pengembangan Pangan Lokal	300.000.000,00	271.600.000,00
41	Pemantauan dan Analisis Ketersediaan Pangan Wilayah	400.000.000,00	400.000.000,00
42	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran	50.000.000,00	50.000.000,00
43	Pameran Agribisnis dan Hasil Produksi Pangan Lokal	400.000.000,00	400.000.000,00
44	Analisis Situasi Konsumsi Pangan Penduduk	300.000.000,00	300.600.000,00
45	Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau	40.000.000,00	40.000.000,00
46	Pengawawan Mutu dan Keamanan Pangan	400.000.000,00	361.200.000,00
47	Kajian Ketahanan Pangan Provinsi Riau	800.000.000,00	-

48	Pengadaan beras cadangan untuk krisis pangan	300.000.000,00	-
VIII	**Program Pengembangan Data/Informasi**	**998.550.000,00**	**275.750.000,00**
49	Dukungan Pelaksanaan Pameran Tahunan Provinsi Riau	150.000.000,00	175.750.000,00
50	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Ketahanan Pangan	100.000.000,00	100.000.000,00
51	Promosi Ketahanan Pangan Provinsi Riau Pda Media TV Online	150.000.000,00	-
52	Visualisasi Peningkatan Ketahanan Pangan Provinsi Riau pada media TV Online	150.000.000,00	-
53	Visualisasi Peningkatan Kesejahteraan Petani pada media TV Online	150.000.000,00	-
54	Visualisasi Peningkatan Ketahanan Pangan Provinsi Riau pada media TVOnline	150.000.000,00	-
55	Informasi Peningkatan Ketahanan Pangan Provinsi Riau melalui Media Cetak	150.000.000,00	-
	Jumlah	**11.015.550.000,00**	**8.462.632.000,00**

Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau pada tahun 2014 juga mendapatkan sumber dana APBN Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dengan 1 (satu) Program yaitu Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat pada masing-masing sumber dana dengan rincian sebagai berikut :

Dekonsentrasi Rp. 4.797.321.000

No.	Kegiatan	Anggaran
1.	Pengembangan Sistem Distribusi Dan Stabilitas Harga Pangan	**380.140.000**
	Pengembangan Ketersediaan dan Penangan Rawan Pangan	**2.010.000.000**
2.	Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar	**1.746.981.000**
3.	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan	**660.200.000**
	JUMLAH	**4.797.321.000**

Untuk melihat Realisasi Fisik dan keuangan dari program/kegiatan yang telah dilaksanakan baik dari Anggaran APBD maupun APBN dapat dilihat dibawah ini :

APBD Tahun 2014

No	Nama Kegiatan / Perincian Kegiatan	Jumlah Anggaran Rp	Bobot (%)	Volume Kegiatan	Realisasi			
					Fisik		Keuangan	
					%	Tertimbang	%	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**1.339.890.000**						
1,1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	0,12	1 Tahun	18,00	0,02	18,00	1.800.000,00
1,2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	260.000.000	3,07	1 Tahun	80,00	2,46	66,25	172.244.266,00
1,3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	176.840.000	2,09	1 Tahun	100,00	2,09	100,00	176.840.000,00
1,4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	75.000.000	0,89	1 Tahun	99,12	0,88	99,12	74.337.260,00
1,5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	60.000.000	0,71	1 Tahun	94,22	0,67	94,22	56.534.200,00
1,6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	75.000.000	0,89	1 Tahun	98,81	0,88	98,81	74.104.140,00
1,7	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100.000.000	1,18	1 Tahun	100,00	1,18	99,59	99.591.800,00

1,8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.000.000	0,35	1 Tahun	100,00	0,35	81,97	24.592.000,00
1,9	Penyediaan Makanan dan Minuman	50.000.000	0,59	1 Tahun	100,00	0,59	80,95	40.475.000,00
1,10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	438.050.000	5,18	1 Tahun	76,00	3,93	69,61	304.905.150,00
1,11	Penyediaaan jasa administrasi kantor	65.000.000	0,77	1 Tahun	92,00	0,71	80,00	52.000.000,00
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**185.000.000**						
2,1	Pembangunan Gedung Kantor	-	-	1 Tahun	0,00	0,00	0,00	-
2,2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	35.000.000	0,41	1 Tahun	100,00	0,41	98,40	34.440.000,00
2,3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	40.000.000	0,47	1 Tahun	100,00	0,47	99,49	39.795.000,00
2,4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	50.000.000	0,59	1 Tahun	99,70	0,59	98,70	49.350.575,00
2,5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	60.000.000	0,71	1 Tahun	92,79	0,66	92,79	55.674.880,00
3	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**-**						
3,1	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	-	-	1 Tahun	0,00	0,00	0,00	-

4	**Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**26.000.000**						
4,1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	-	1 Tahun	0,00	0,00	0,00	-
4,2	Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	26.000.000	0,31	1 Tahun	51,45	0,16	51,45	13.378.000,00
5	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**187.050.000**						
5,1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	43.000.000	0,51	1 Tahun	66,98	0,34	64,36	27.675.000,00
5,2	Penyusunan pelaporan pronosis realisasi anggaran	10.000.000	0,12	1 Tahun	100,00	0,12	100,00	10.000.000,00
5,3	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD	126.450.000	1,49	1 Tahun	28,59	0,43	12,58	15.910.600,00
5,4	Penyusunan laporan Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (lakip)	7.600.000	0,09	1 Tahun	100,00	0,09	91,12	6.925.000,00
6	**Program Peningkatan Kesejahteraan Petani**	**1.411.600.000,00**						
6,1	Pengembangan dan Pemberdayaan Cadangan Pangan Masyarakat	400.000.000	4,73	1 Tahun	55,00	2,60	51,40	205.595.450,00
6,2	Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, seimbang dan Aman (B2SA)	484.550.000	5,73	1 Tahun	91,02	5,21	79,47	385.070.000,00

6,3	Penanggulangan Daerah Rawan Pangan	177.050.000	2,09	1 Tahun	0,00	0,00	0,00	-
6,4	Pemberdayaan Gapoktani dalam Penyediaan Pangan Masyarakat se Provinsi Riau	350.000.000	4,14	1 Tahun	50,00	2,07	45,34	158.693.720,00
7	**Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan**	**5.037.342.000**						
7,1	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	501.242.000	5,92	1 Tahun	29,00	1,72	19,90	99.762.600,00
7,2	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Ketahanan Pangan	100.000.000	1,18	1 Tahun	65,91	0,78	49,89	49.887.700,00
7,3	Sertifikasi Pangan Segar (Buah dan Sayur)	250.000.000	2,95	1 Tahun	100,00	2,95	20,53	51.326.600,00
7,4	Penyusunan Statistik Pangan	100.000.000	1,18	1 Tahun	100,00	1,18	65,80	65.802.300,00
7,5	Sinkronisasi Peningkatan Ketahanan Pangan	250.000.000	2,95	1 Tahun	100,00	2,95	62,31	155.765.000,00
7,6	Lomba Cipta Menu B2SA Tingkat Provinsi dan Nasional	333.850.000	3,94	1 Tahun	100,00	3,94	84,30	281.436.100,00
7,7	Peningkatan Akselerasi Ketahanan Pangan di Provinsi Riau	200.000.000	2,36	1 Tahun	95,05	2,25	63,58	127.159.350,00
7,8	Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	385.350.000	4,55	1 Tahun	100,00	4,55	48,24	185.896.300,00

7,9	Rapat Koordinasi Teknis Ketahanan Pangan se Propinsi Riau	283.850.000	3,35	1 Tahun	0,00	0,00	0,00	-
7,10	Pengelolaan Pemanfaatan Pekarangan/Peran Perempuan dalam Ketahanan Pangan	243.850.000	2,88	1 Tahun	80,41	2,32	67,89	165.555.200,00
7,11	Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	366.400.000	4,33	1 Tahun	56,37	2,44	38,33	140.458.700,00
7,12	Pemantauan dan Analisis ketersedian Pangan Wilayah	200.000.000	2,36	1 Tahun	99,00	2,34	90,95	181.893.400,00
7,13	Pengembangan Pangan Lokal	271.600.000	3,21	1 Tahun	0,00	0,00	0,00	-
7,14	Pemantauan Akses, Pasokan dan Harga Pangan	400.000.000	4,73	1 Tahun	96,67	4,57	80,86	323.449.240,00
7,15	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran	50.000.000	0,59	1 Tahun	100,00	0,59	67,45	33.723.600,00
7,16	Pameran Agribisnis dan Hasil Produksi Pangan Lokal	400.000.000	4,73	1 Tahun	100,00	4,73	89,39	357.548.800,00
7,17	Analisis Situasi Konsumsi Pangan Penduduk	300.000.000	3,54	1 Tahun	60,00	2,13	59,92	179.753.100,00
7,18	Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau	40.000.000	0,47	1 Tahun	30,00	0,14	19,60	7.840.000,00
7,19	Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	361.200.000	4,27	1 Tahun	51,34	2,19	51,34	185.433.200,00
7,20	Kajian Ketahanan Pangan Provinsi Riau	-	-	1 Tahun	0,00	0,00	0,00	-

7,21	Kajian Model dan Strategi Peningkatan Ketahanan Pangan Provinsi Riau	-	-	1 Tahun	0,00	0,00	0,00	-
8	**Program Pengembangan Data / Informasi**	**275.750.000**						
8,1	Dukungan pelaksanaan Pameran Tahunan Propinsi Riau	175.750.000	2,08	1 Tahun	91,49	1,90	91,49	160.791.000,00
8,2	Pengembangan Sistem Infiormasi manajemen Ketahanan Pangan	100.000.000	1,18	1 Tahun	63,50	0,75	63,50	63.499.000,00
8,3	Promosi Ketahanan Pangan Provinsi Riau pada Media Online	-	-	1 Tahun	0,00	0,00	0,00	-
8,4	Visualisasi Peningkatan Ketahanan Pangan Provinsi Riau pada Media TV Online	-	-	1 Tahun	0,00	0,00	0,00	-
8,5	Visualisasi Peningkatan Kesejahteraan Petani pada Media TV Online	-	-	1 Tahun	0,00	0,00	0,00	-
8,6	Visualisasi Penigkatan Ketahanan Pangan Provinsi Riau pada Media TV Online	-	-	1 Tahun	0,00	0,00	0,00	-
8,7	Informasi Peningkatan Ketahanan Pangan Provinsi Riau melalui Media Cetak	-	-	1 Tahun	0,00	0,00	0,00	n
TOTAL DANA KEGIATAN		**8.462.632.000**	**100,00**			**71,33**	**57,87**	**4.896.913.231,00**

APBN (Dekonsentrasi)

No	NAMA KEGIATAN & KODE PROYEK					REALISASI PENYERAPAN DANA						PELAKSANAAN FISIK	
												REALISASI	Tertimbang
		Rp. MURNI	PLN	JUMLAH	Bobot	Rp. MURNI	%	PHLN	%	JUMLAH	%	%	%
1	2	3	4	5 (3+4)	6	7	8 (7:3)	9	10 (9:4)	11 (7+9)	12 (11:5)	13	14 (13x6)
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT												
I.	PENGEMBANGAN DISTRIBUSI DAN STABILITAS HARGA PANGAN (14.1814)	**380.140.000**	**-**	**380.140.000**	**7,92**	**379.046.000**	**99,71**	**-**	**-**	**379.046.000**	**99,71**	**100,00**	**7,92**
	- JUMLAH GABUNGAN KELOMPOK TANI YANG DIBERDAYAKAN (14.1814.001)	100.650.000	-	100.650.000	2,10	99.656.000	99,01	-	-	99.656.000	99,01	100,00	2,10
	- JUMLAH LUMBUNG PANGAN YANG DIBERDAYAKAN (14.1814.002)	169.750.000	-	169.750.000	3,54	169.750.000	100,00	-	-	169.750.000	100,00	100,00	3,54
	- LAPORAN KONDISI HARGA PANGAN POKOK (14.1814.003)	109.740.000	-	109.740.000	2,29	109.640.000	99,91	-	-	109.640.000	99,91	100,00	2,29
	- -												
II.	PENGEMBANGAN KETERSEDIAAN DAN PENANGANAN RAWAN PANGAN (14.1815)	**2.010.000.000**	**-**	**2.010.000.000**	**41,90**	**1.914.960.000**	**95,27**	**-**	**-**	**1.914.960.000**	**95,27**	**95,31**	**39,94**
	- JUMLAH DESA MANDIRI PANGAN YANG DIBERDAYAKAN (14.1815.001)	1.663.850.000	-	1.663.850.000	34,68	1.628.210.000	97,86	-	-	1.628.210.000	97,86	97,90	33,95
	- LAKASI PENANGANAN RAWAN PANGAN, SKPG (14.1815.003)	143.000.000	-	143.000.000	2,98	113.700.000	79,51	-	-	113.700.000	79,51	79,60	2,37
	- LAPORAN KAJIAN KETERSEDIAAN PANGAN, RAWAN PANGAN DAN AKSES PANGAN (14.1815.006)	41.450.000	-	41.450.000	0,86	41.450.000	100,00	-	-	41.450.000	100,00	100,00	0,86

	- LAPORAN KEGIATAN DAN PEMBINAAN (Output Generik) (14.1815.009)	161.700.000	-	161.700.000	3,37	131.600.000	81,39	-	-	131.600.000	81,39	81,40	2,74
III.	PENGEMBANGAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN DAN PENINGKATAN KEAMANAN PANGAN SEGAR (14.1816)	**1.746.981.000**	**-**	**1.746.981.000**	**36,42**	**1.693.718.200**	**96,95**	**-**	**-**	**1.693.718.200**	**96,95**	**96,99**	**35,32**
	- PENDAMPINGAN P2KP (Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan) (14.1816.001)	1.544.096.000	-	1.544.096.000	32,19	1.524.883.200	98,76	-	-	1.524.883.200	98,76	98,80	31,80
	- PEMANTAUAN, MONITORING, EVALUASI DAN PERUMUSAN KEBIJAKAN P2KP (14.1816.002)	119.885.000	-	119.885.000	2,50	86.670.000	72,29	-	-	86.670.000	72,29	72,30	1,81
	- LAPORAN PROMOSI P2KP (Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan) (14.1816.003)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- SITUASI KONSUMSI PANGAN PENDUDUK (14.1816.004)	8.000.000	-	8.000.000	0,17	8.000.000	100,00	-	-	8.000.000	100,00	100,00	0,17
	- HASIL KOORDINASI KEAMANAN PANGAN SEGAR (14.1816.007)	75.000.000	-	75.000.000	1,56	74.165.000	98,89	-	-	74.165.000	98,89	98,90	1,55
IV.	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TEKNIS LAINNYA BADAN KETAHANAN PANGAN (14.1817)	**660.200.000**	**-**	**660.200.000**	**13,76**	**598.957.000**	**90,72**	**-**	**-**	**598.957.000**	**90,72**	**90,74**	**12,49**
	- DUKUNGAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN LAPORAN KEUANGAN (14.1817.001)	325.000.000	-	325.000.000	6,77	296.042.000	91,09	-	-	296.042.000	91,09	91,10	6,17
	- HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI PROGRAM (14.1817.002)	137.200.000	-	137.200.000	2,86	108.515.000	79,09	-	-	108.515.000	79,09	79,10	2,26
	- DUKUNGAN MANAJEMEN DAN ADMINISTRASI (14.1817.009)	198.000.000	-	198.000.000	4,13	194.400.000	98,18	-	-	194.400.000	98,18	98,20	4,05
J U M L A H		**4.797.321.000**	**-**	**4.797.321.000**	**100,00**	**4.586.681.200**	**95,61**	**-**	**-**	**4.586.681.200**	**95,61**	**95,67**	**95,67**

3.5. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Kegiatan

Efisiensi

Efisiensi merupakan suatu perhitungan yang membandingkan antara target keluaran dan realisasi keluaran. Sementara efektivitas merupakan perhitungan antara keluaran dengan hasil (output dan outcome). Efisiensi terjadi apabila realisasi masukan ternyata lebih kecil dari target yang ditetapkan sebelumnya sementara keluaran atau output mencapai target yang diharapkan. Rumusan yang digunakan untuk menghitung efisiensi tersebut adalah sebagai berikut

$$\textit{Efisiensi} = \frac{\text{UCO } \textit{Ren} - (\text{UCO } \textit{Real} - \text{UCO } \textit{Ren})}{\text{UCO } \textit{Ren}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan untuk kegiatan di lingkup Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau yang bersumber dari APBD dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL PERHITUNGAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS KEGIATAN APBD TAHUN 2014

NO.	KEGIATAN	INPUT		OUTPUT		Unit Cost Output (UCO)		Hasil Perhitungan	Efisiensi	Rata-rata Capaian Output	Rata-rata Capaian Outcome	Efektivitas
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi					
1	Pengembangan dan Pemberdayaan Cadangan Pangan Masyarakat	400.000.000	205.595.450	68	20	5.882.353	10.279.773	25,24	(74,76)	29,41	29,41	100,00
2	Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Berimbang dan Aman (B2SA)	484.550.000	385.070.000	1.500	1.500	323.033	256.713	120,53	20,53	-	100,00	-
3	Penanganan Daerah Rawan Pangan	177.050.000	-	12	-	14.754.167	-	-	-	-	100,00	-
4	Pemberdayaan Gapoktan dalam Penyedia Pangan Masyarakat se Provins Riau	350.000.000	158.693.720	80	26	4.375.000	6.103.605	60	-39,51	32,50	50,00	153,85
5	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	501.242.000	99.762.600	12	12	41.770.167	8.313.550	180,10	80,10	100,00	100,00	100,00
6	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ketahanan Pangan	100.000.000	49.887.700	24	-	4.166.667	-	-	-	-	100,00	-
7	Sertifikasi Pangan Segar (Buah dan Sayur)	250.000.000	51.326.600	20	14	12.500.000	3.666.186	170,67	70,67	70,00	41,67	59,53
8	Penyusunan Statistik Pangan	100.000.000	65.802.300	12	12	8.333.333	5.483.525	134,20	34,20	100,00	100,00	100,00
9	Sinkronisasi Peningkatan Ketahanan Pangan	250.000.000	155.765.000	26	26	9.615.385	5.990.962	137,69	37,69	100,00	100,00	100,00
10	Lomba Cipta MenuB2SA Tingkat Provinsi dan Nasional	333.850.000	281.436.100	12	10	27.820.833	28.143.610	98,84	(1,16)	83,33	83,33	100,00

11	Peningkatan Akselerasi Ketahanan Pangan di Provinsi Riau	200.000.000	127.159.350	15	12	13.333.333	10.596.613	120,53	20,53	80,00	41,67	52,09
12	Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	385.350.000	185.896.300	3	3	128.450.000	61.965.433	151,76	51,76	100,00	100,00	100,00
13	Rapat Koordinasi Teknis Ketahanan Pangan se Provinsi Riau	283.850.000	-	12	-	23.654.167	-	-	-	-	-	-
14	Pengelolaan Pemanfaatan Pekarangan/Peran Perempuan dalam Ketahanan Pangan	243.850.000	165.555.200	125	120	1.950.800	1.379.627	129,28	29,28	96,00	80,00	83,33
15	Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	366.400.000	140.458.700	152	144	2.410.526	975.408	159,54	59,54	94,74	91,67	96,76
16	Pemantauan dan Analisis Ketersediaan Pangan Wilayah	200.000.000	181.893.400	36	36	5.555.556	5.052.594	109,05	9,05	100,00	140,13	140,13
17	PengembanganPangan Lokal	271.600.000	-	12	-	22.633.333	-	-	-	-	-	-
18	Pemantauan Akses, Pasokan dan Harga Pangan	400.000.000	323.449.240	12	12	33.333.333	26.954.103	119,14	19,14	100,00	100,00	100,00
19	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran	50.000.000	33.723.600	20	4	2.500.000	8.430.900	(137,24)	(237,24)	20,00	20,00	100,00
20	Pameran Agribisnis dan Hasil Produksi Pangan Lokal	400.000.000	357.548.800	3	3	133.333.333	119.182.933	110,61	10,61	100,00	100,00	100,00
21	Analisis Situasi Konsumsi Pangan Penduduk	300.000.000	179.753.100	12	12	25.000.000	14.979.425	140,08	40,08	100,00	94,87	94,87
22	Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau	40.000.000	7.840.000	111,500	111,500	358.744	70.314	180,40	80,40	100,00	100,00	100,00

23	Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	361.200.000	185.433.200	12	12	30.100.000	15.452.767	148,66	48,66	100,00	100,00	100,00
24	Dukungan Pelaksanaan Pameran Tahunan Provinsi Riau	175.750.000	160.791.000	1	1	175.750.000	160.791.000	108,51	8,51	100,00	100,00	100,00
25	Pengembangan Siistem Informasi Manajemen Ketahanan Pangan	100.000.000	63.499.000	1	1	100.000.000	63.499.000	136,50	36,50	100,00	-	-
	Jumlah Rata-rata							96,18	12,18	68,24	74,91	75,22

TABEL PERHITUNGAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS KEGIATAN APBN (DK & TP)

Dekonsentrasi

NO.	KEGIATAN	INPUT		OUTPUT		Unit Cost Output (UCO)		Hasil Perhitungan	Efisiensi	Rata-rata Capaian Output	Rata-rata Capaian Outcome	Efektivitas
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi					
1	Pengembangan Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	380.140.000	379.046.000	24	24	15.839.167	15.793.583	100,29	0,29	100,00	100,00	100,00
2	Pengembangan ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan	2.010.000.000	1.914.960.000	9	9	223.333.333	212.773.333	104,73	4,73	100,00	100,00	100,00
3	Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar	1.746.981.000	1.693.718.200	73	72	23.931.247	23.523.864	101,70	1,70	99,00	100,00	101,01
4	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan	660.200.000	158.693.720	14	14	47.157.143	11.335.266	175,96	75,96	100,00	100,00	100,00
	Jumlah Rata-rata							120,67	20,67	99,75	100,00	100,25

Dari hasil perhitungan kegiatan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau sebesar **96,18** %. Sehingga dapat dikatakan kegiatan yang dilakukan di Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau yang bersumber dari APBD adalah efesien dengan angka efesiensi sebesar **12,18** %. **%.**

Dari hasil perhitungan didapat angka Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau untuk kegiatan dari Dana Dekonsentrasi sebesar **120,67** %. Sehingga dapat dikatakan kegiatan yang dilakukan di Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau yang bersumber dari APBN adalah efesien dengan angka efesiensi sebesar **20,67** %.

Efektivitas

Efektivitas suatu kegiatan merupakan perbandingan antara ouput/keluaran dengan outcome/hasil yang diberikan dari kegiatan tersebut. Rumusan yang digunakan untuk menghitung efektivitas dari suatu kegiatan adalah :

$$\textit{Efektivitas} = \frac{\textit{Realisasi Out Come}}{\textit{Realisasi Ouput}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan untuk kegiatan yang bersumber dari APBD di lingkup Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel berikut :

NO.	KEGIATAN	Persentase Capaian Output	Persentase Capaian Outcome	Efektivitas
1	Pengembangan dan Pemberdayaan Cadangan Pangan Masyarakat	29,41	29,41	100,00
2	Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Berimbang dan Aman (B2SA)	-	100,00	-
3	Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan	-	100,00	-

4	Pemberdayaan Gapoktan dalam Penyedia Pangan Masyarakat se Provins Riau	32,50	50,00	153,85
5	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	100,00	100,00	100,00
6	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ketahanan Pangan	-	100,00	-
7	Sertifikasi Pangan Segar (Buah dan Sayur)	70,00	41,67	59,53
8	Penyusunan Statistik Pangan	100,00	100,00	100,00
9	Sinkronisasi Peningkatan Ketahanan Pangan	100,00	100,00	100,00
10	Lomba Cipta MenuB2SA Tingkat Provinsi dan Nasional	83,33	83,33	100,00
11	Peningkatan Akselerasi Ketahanan Pangan di Provinsi Riau	80,00	41,67	52,09
12	Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	100,00	100,00	100,00
13	Rapat Koordinasi Teknis Ketahanan Pangan se Provinsi Riau	-	-	-
14	Pengelolaan Pemanfaatan Pekarangan/Peran Perempuan dalam Ketahanan Pangan	96,00	80,00	83,33
15	Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	94,74	91,67	96,76
16	Pemantauan dan Analisis Ketersediaan Pangan Wilayah	100,00	140,13	140,13
17	PengembanganPangan Lokal	-	-	-
18	Pemantauan Akses, Pasokan dan Harga Pangan	100,00	100,00	100,00
19	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran	20,00	20,00	100,00
20	Pameran Agribisnis dan Hasil Produksi Pangan Lokal	100,00	100,00	100,00
21	Analisis Situasi Konsumsi Pangan Penduduk	100,00	94,87	94,87
22	Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau	100,00	100,00	100,00
23	Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	100,00	100,00	100,00
24	Dukungan Pelaksanaan Pameran Tahunan Provinsi Riau	100,00	100,00	100,00
25	Pengembangan Siistem Informasi Manajemen Ketahanan Pangan	100,00	-	-
	JUMLAH	68,24	74,91	75,22

Dengan demikian maka dapat dikatakan kegiatan APBD yang dilakukan di Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau dapat dikatakan efektif dengan nilai capaian sebesar **75,22** %.

Hasil perhitungan untuk kegiatan yang bersumber dari APBN di dapat dilihat pada tabel berikut :

Dekonsentrasi

NO.	KEGIATAN	Persentase Capaian Output	Persentase Capaian Outcome	Efektivitas
1	Pengembangan Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	100,00	100,00	100,00
2	Pengembangan ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan	100,00	100,00	100,00
3	Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar	99,00	100,00	101,01
4	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan	100,00	100,00	100,00
	Jumlah	99,75	100,00	100,25

Dengan demikian maka dapat dikatakan kegiatan APBN efektif dengan nilai capaian efektivitas dekonsentrasi sebesar **100,25** %.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Tingkat Keberhasilan dan Kegagalan

Dari bab sebelumnya telah disampaikan bahwa dari sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2014, bahwa Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau dapat merealisasikan **92,26 %.**

Berikut ini adalah keberhasilan yang dicapai Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau :

Bidang Konsumsi Pangan :

1. Tervisualisasikannya peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat.
2. Terimplementasikannya kualitas konsumsi melalui pemanfaatan pekarangan.
3. Teranalisanya bahan berbahaya pada pangan.
4. Terinformasikannya diversifikasi pangan berdasarkan pola pangan harapan.
5. Berkembangnya beras analog yang bersumber dari umbi-umbian.
6. Terbinanya mutu olahan pangan lokal.
7. Terpantaunya konsumsi pangan masyarakat.
8. Terinformasikannya makanan tradisional dan makanan khas daerah.

Bidang Kewaspadaan Pangan :

1. Teranalisanya bahan berbahaya pada pangan.
2. Tersusunnya peta kerawanan pangan Riau
3. Terlaksananya pengawasan keamanan pangan
4. Tersertifikasinya beberapa Komoditi Sayur dan Buah

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan :

1. Terfasilitasinya pengembangan lumbung pangan
2. Terfasilitasinya pengadaan cadangan pangan daerah dan masyarakat.
3. Teranalisanya ketersediaan pangan.
4. Tersedianya cadangan pangan komoditi beras Pemerintah Provinsi Riau.
5. Terfasilitasinya pengembangan Usaha Ekonomi Produktif dalam rangka menunjang ketersediaan pangan.
6. Terfasilitasinya operasi pasar dan pasar murah di Riau.
7. Terfasilitasinya penyaluran DPM LUEP untuk pembelian gabah petani.
8. Terpantaunya akses pangan masyarakat.
9. Terkoordinirnya perencanaan pembangunan ketahanan pangan Riau.
10. Terkoordinasi dan terpantaunya distribusi dan stabilitas harga HBKN.

Bidang Kelembagaan Pangan :

1. Terfasilitasinya pengembangan desa mandiri pangan.
2. Terfasilitasinya pengembangan bahan pangan
3. Teridentifikasinya kelembagaan yang mendukung food centre
4. Tersedianya data ketahanan pangan di Riau
5. Terkoordinasikannya rencana induk ketahanan pangan Riau
6. Tersusunnya rencana induk ketahanan pangan Riau.

4.2. Kendala dan Hambatan dalam Pencapaian Sasaran

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan implementasi transparansi pemerintah dalam mengemban amanat pelayan publik. Implikasi yang harus terjadi dari pelaksanaan akuntabilitas adalah peningkatan kinerja, karena melalui akuntabilitas

tersebut, akan ditemukenali faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi, baik dalam pemanfaatan sumber daya maupun proses implementasi.

Penyusunan LAKIP Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau, pada prinsipnya tidak hanya dijadikan sebagai media dalam pemenuhan kebutuhan laporan, melalui format-format yang disediakan dalam konteks konsekuensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, melainkan hal tersebut menjadi sumber informasi dalam mendorong terciptanya peningkatan kinerja organisasi pada umumnya, dan aparatur pada khususnya. Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2014, dapat dikemukakan beberapa hal penting sebagai berikut :

a. Ditemukenalinya definisi program yang kurang sesuai dengan tujuan dan sasaran misi yang telah ditetapkan. Hal ini berimplikasi pada ketidakjelasan tujuan kinerja program yang dihasilkannya.
b. Pendefinisian kegiatan dalam program, masih belum mempertimbangkan posisi relatif kinerja kegiatan yang akan dihasilkan, dengan tujuan dan sasaran program yang telah ditetapkan.
c. Rencana Kerja (Renja) BKP yang merupakan operasionalisasi kebijakan jangka menengah, belum tersusun dengan baik dan memiliki indikator kinerja yang jelas. Hal ini akan berimplikasi pada tidak jelasnya target kinerja tahunan yang akan dicapainya, baik program maupun kegiatan.
d. Bila memperhatikan hasil penilaian terhadap program yang telah dilaksanakan oleh BKP pada tahun 2014, menunjukan bahwa rata-rata capaian kinerja Program dan Kegiatan APBD adalah **63,87** %, angka tersebut jauh dari yang diharapkan dan hal ini memberikan indikasi yang kuat bahwa kinerja yang dihasilkan kurang baik.

e. Dalam hal capaian kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BKP pada tahun 2014, dimana hal ini memberikan gambaran efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran program adalah **75,22** %.

f. Target capaian Sasaran Penetapan Kinerja yang ditetapkan oleh BKP berdasarkan tugas pokok, fungsi, adalah sebesar **92,26** % dari maksimal capaian sebesar **100** %. Hal ini memberikan gambaran bahwa output kegiatan yang dihasilkan tidak memungkinkan pencapaian sasaran akhir yang absolut (**100**%). Kondisi ini disadari bahwa fungsi koordinatif yang dijalankan oleh Badan Ketahanan Pangan, tidak dapat secara maksimal berjalan jika tidak didukung oleh stakeholder lain, atau dengan kata lain kinerja organisasi akan sangat dipengaruhi oleh eksternalitas.

4.3. Strategi Pemecahan Masalah

Perlu dilakukannya peningkatan kompetensi aparatur pada lingkungan internal Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau, terutama dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban sebagai organisasi yang berperan dalam menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang ketahanan pangan, serta pemberian dukungan atas penyelenggaraan program dan kegiatan bidang ketahanan pangan. Selain itu juga perlu dikembangkan strategi koordinasi yang pada gilirannya akan meningkatkan kinerja organisasi melalui dukungan ekternalitas organisasi.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau, Tahun 2014 yang dapat Kami sampaikan. Kiranya laporan ini dapat menjadikan informasi yang valid dalam menilai kinerja organisasi.